

KONSEPSI DUKUNGAN LOGISTIK GUNA KESIAPAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN PULAU TERLUAR DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS KORPS MARINIR

Markus Martua Pakpahan¹, Dr. Sudardi, S.H., M.H.², Teddy Yulianda Bakri³

Strategi Operasi Laut, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: ¹markus.pakphan.mp49@gmail.com, ²sudardi@seskoal.ac.id, ³rahjaroo@gmail.com

Abstract

These outermost islands of Indonesia have strategic value as the basic point of the baseline of the Indonesian Archipelago in determining the Indonesian territorial waters of the Indonesian Exclusive Economic Zone, and the Indonesian continental shelf, besides that these outermost islands have natural resources that can improve the welfare of the community if managed well. With the potential it has, it is necessary to manage Indonesia's outermost islands by paying attention to integration in the social, economic, cultural, legal, human resources and defense and security sectors.

Implementation of logistical support for The Task forces of outer islands security requires a concept of logistical support to overcome infrastructure, communication and information problems as well as logistics management which must be completed in support of the readiness of the task force for securing the outer islands in order to support the Marine Corps' duties with integrated communication and information on infrastructure in accordance with the mechanism. logistics management.

In overcoming existing problems, a logistics support concept is needed which can be implemented using methods of regulation, coordination, socialization and evaluation which are carried out continuously so that infrastructure, communication and information are created in a logistics management system that can be implemented.

With proper and precise logistics support, the readiness of the outer island security task force will be fulfilled in order to support the duties of the Marine Corps.

Key words: logistical support, readiness of the outer island task force, main tasks.

ABSTRAK

Pulau – pulau terluar Indonesia tersebut memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan landasan kontinen Indonesia, selain itu pulau – pulau terluar ini mempunyai sumber daya alam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Dengan potensi yang dimiliki maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pulau – pulau terluar Indonesia dengan memperhatikan keterpaduan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia dan pertahanan dan keamanan

Pada pelaksanaan dukungan logistik pengamanan pulau terluar membutuhkan konsep dukungan logistik untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, komunikasi dan informasi serta manajemen logistik yang harus diselesaikan dalam mendukung kesiapan satuan tugas pengamanan

pulau terluar dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir dengan terpadunya komunikasi dan informasi terhadap infrastruktur yang sesuai dengan mekanisme manajemen logistik.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada maka perlu konsep dukungan logistik yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode regulasi, koordinasi, sosialisasi dan evaluasi yang di laksanakan secara trus menurus sehingga infrastruktur, terciptanya komunikasi dan informasi yang terbentuk dalam sistem manajemen logistic yang dapat dilaksanakan.

Dengan terdukung logistik secara baik kesiapan satuan tugas pengamanan pulau terluar akan terpenuhi dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir.

Kata kunci: dukungan logistik, kesiapan satuan tugas pulau terluar, tugas pokok.

1. Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 pasal 63 bahwa Korps Marinir mempunyai tugas menyelenggarakan operasi pertahanan amfibi, operasi pertahanan pantai, dan pengamanan pulau terluar strategis dalam rangka Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang serta operasi lainnya sesuai kebijakan Panglima. Pelaksanaan tugas Korps Marinir dalam pengamanan pulau-pulau terluar diselenggarakan dengan mengirimkan satgas pengamanan pulau terluar di sebelas lokasi pulau-pulau terluar di wilayah yuridiksi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pulau – pulau terluar tersebut memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal penetapan wilayah yuridiksi nasional Indonesia sampai dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Disamping itu pulau – pulau terluar mempunyai kandungan sumber daya alam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Dengan potensi yang dimiliki maka perlu dilakukan

pengelolaan terhadap pulau – pulau terluar Indonesia dengan memperhatikan keterpaduan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia dan pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu penyelenggaraan operasi pengamanan pulau terluar Korps Marinir ini harus dilaksanakan dengan baik karena memiliki arti yang sangat penting kepada kepentingan nasional khususnya masalah penegakan kedaulatan negara dan penjagaan integritas wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Salah satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan satuan tugas ini adalah masalah dukungan logistik yang meliputi perbekalan dan pembekalan kelas – kelas bekal, fasilitas dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas. Berdasarkan Analisa data-data kondisi logistik di semua lokasi pulau terluar bahwa kondisi dukungan logistik masih kurang terutama di pulau-pulau terluar yang tidak berpenduduk. Tugas pokok satuan tugas sering tidak terlaksana dengan optimal karena permasalahan kondisi dukungan logistik terutama, alat komunikasi dan sistem komando pengendalian, sarana angkut perairan, dan sarana

dan prasarana yang terdapat di pulau – pulau terluar.

Bertolak dari kondisi dukungan logistik satuan tugas pengamanan pulau -pulau terluar saat ini, penulis mencoba menguraikan dan memecahkan masalah ini dengan melaksanakan penelitian dengan metoda kualitatif SWOT guna mendapatkan konsepsi terbaik tentang dukungan logistik guna kesiapan satuan tugas pengamanan pulau terluar dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir.

2. Metode Dan Pendekatan.

Metode. Dalam penulisan tugas karya perorangan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran bagaimana konsepsi dukungan logistik diselenggarakan guna keispian satuan tugas pulau – pulau terluar dalam rangka mendukung tugas pokok Korps Marinir.

Pendekatan. Penulisan kertas karya perorangan ini menggunakan pendekatan keperpustakaan dan survey.

3. Pembahasan.

Dalam rangka mendukung tugas pokok Korps Marinir guna kesiapan satuan tugas pulau - pulau terluar, Korps Marinir menyusun konsepsi dukungan logistic yang baik dan benar dengan berbagai pengaruh faktor eksternal dan internal, serta peluang dan kendala.

a. Faktor Eksternal.

- 1) Pemerintah Daerah.

- 2) Kondisi Geografi.
- 3) Ideologi.
- 4) Pertahanan dan Keamanan.
- 5) Politik.
- 6) Ekonomi.
- 7) Sosial Budaya.

b. Faktor Internal.

- 1) Mabes TNI.
- 2) Mabes TNI AL.
- 3) Korps Marinir.

c. Peluang.

- 1) Peningkatan anggaran pertahanan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki TNI.
- 2) Sumber daya manusia (masyarakat), lingkungan dan kekayaan alam diwilayah pulau-pulau terluar.
- 3) Proses pembangunan di wilayah pulau-pulau terluar.

d. Kendala.

- 1) Peningkatan anggaran yang belum optimal.
- 2) Kondisi wilayah yang terisolir dengan sosial budaya.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan.

4. Pembahasan.

Satuan Tugas Pengamanan Pulau -Pulau Terluar Korps Marinir dikerahkan di sebelas pulau terluar di seluruh wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Adapun pulau – pulau terluar tersebut adalah Pulau Rondo di provinsi Aceh, Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara, Pulau Sekatung Provinsi Riau Kepulauan, Pulau Nipah di Provinsi Riau, Pulau Fani dan Pulau Fanildo Provinsi Papua, Pulau Dana Rote dan Pulau Batek Provinsi NTT, Pulau Deli Provinsi Banten, Pulau Barung Provinsi Jawa Timur, Pulau Meitimiarang Provinsi Maluku. Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh satuan tugas tersebut adalah untuk menunjukkan pendudukan dan penguasaan wilayah secara fisik, patrol sektor secara berkala, dan pembinaan territorial terbatas kepada penduduk setempat dan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut guna penyiapan Ruang, Alat, dan Kondisi Juang (RAK) dalam rangka mendukung pertahanan negara.

Namun permasalahan dukungan logistik satuan tugas pengamanan pulau terluar merupakan salah satu faktor yang menentukan kesiapan satuan tugas pengamanan pulau – pulau terluar dalam rangka mendukung tugas pokok Korps Marinir.

Permasalahan belum optimalnya dukungan logistik saat ini menjadi perhatian khusus karena akan berimplikasi negatif terhadap kesiapan satuan tugas pengamanan pulau terluar dan terlaksananya tugas pokok Korps Marinir. Lebih jauh lagi dengan mencermati kondisi saat ini

dimana belum adanya standarisasi sarana prasarana atau infrastruktur yang harus terpenuhi di seluruh pulau – pulau terluar dimana satuan tugas berada, menjadikan perbedaan kesiapan dan keberhasilan pelaksanaan tugas di masing – masing pulau tersebut. Sehingga perhatian terhadap kondisi kesiapan personel yang melaksanakan penugasan dan mempunyai efek terhadap pengamanan pulau pulau terluar dan bisa menjadikan dampak negatif untuk pasukan sendiri dan wilayah sekitar pulau – pulau tersebut.

a. Pembahasan.

Dalam tulisan ini, penelitian dilaksanakan dengan fokus menganalisa kepada beberapa permasalahan yang mendasar tentang dukungan logistic sebagai salah satu faktor yang menentukan kesiapan satuan tugas pengamanan pulau – pulau terluar dalam rangka melaksanakan tugas pokok Korps Marinir. Adapun beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kondisi Dukungan logistik.

Dukungan logistik yang dimaksud adalah segala material dan jasa berupa infrastruktur dan bekal logistik untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan tugas pengamanan. Infrastruktur meliputi fasilitas labuh, akomodasi, fasilitas listrik dan internet dan helipad. Adapun bekal logistik yang dibutuhkan

oleh satuan tugas adalah beberapa jenis kelas bekal berupa ransum makanan dan minuman, perlengkapan militer, senjata, amunisi dan bahan peledak, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas, alat transportasi perairan dan darat, alat komunikasi, alat optik, alat sensor dan deteksi seperti radar, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam penugasan sektor teritorial dan pemberdayaan sumber daya wilayah terbatas. Bekal logistic tersebut didukung saat awal penugasan yang disebut bekal awal dan selama penugasan secara berkala yang disebut bekal ulang guna memenuhi kebutuhan operasi. Kondisi infrastruktur dan bekal logistic yang tersedia di seluruh pulau terluar tersebut belum ideal dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi. Dari data yang terkumpul dan dianalisa bahwa keterbatasan infrastruktur di beberapa pulau terluar tersebut karena letak geografis, cuaca dan program pembangunan yang belum tersedia atau terlaksana sampai tuntas. Sedangkan permasalahan kondisi bekal logistic adalah

belum adanya standarisasi dukungan bekal logistic.

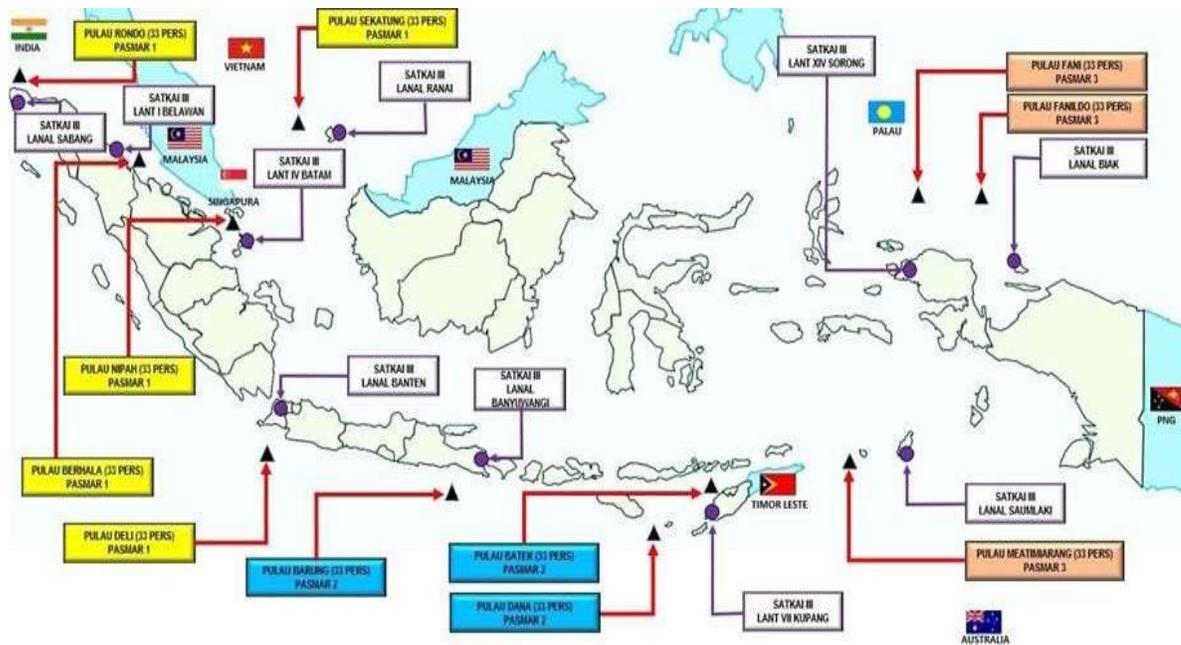
2) Sistem Distribusi Dukungan Logistik atau *Supply Chain System*.

Sistem distribusi dukungan logistic dalam kaitan satuan tugas pengamanan ini adalah sistem distribusi bekal logistic kepada satuan tugas dengan sistem titik dan sistem satuan. Selain itu pelaksanaan sistem distribusi bekal logistic dibagi dua macam yaitu bekal awal yang didukung saat awal penugasan dan bekal ulang yang didukung selama penugasan secara berkala setelah satuan tugas di daerah operasi guna memenuhi kebutuhan operasi. Pada saat ini sistem distribusi dukungan logistic dilaksanakan oleh Mabes TNI dhi Staf Logistik TNI atau Babek TNI melalui Kodam atau Korem atau Kodim selaku Kolakops TNI. Sistem distribusi dukungan tersebut pada umumnya menggunakan sistem dukungan distribusi titik Dimana satuan tugas harus menjemput dukungan logistic ke titik yang ditentukan yang biasanya ke satuan Korem atau Kodim setempat. Kendala yang sering dihadapi adalah keterlambatan dukungan logistic karena keterbatasan alat transport perairan dan darat serta kendala letak geografis kepulauan dan cuaca. Di lain pihak satuan – satuan TNI AL yang lokasinya lebih dekat dengan satuan tugas dan memiliki kemampuan untuk mendukung distribusi logistic tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan tidak adanya koneksifitas sistem

komunikasi dan dukungan logistik antara Kodam dan jajarannya dengan satuan TNI AL yang ada di sekitar lokasi Satgas. Konsep dukungan bekal yang diharapkan adalah Kormar sebagai Komando operasi mengajukan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh satuan tugas pengamanan pulau terluar kepada Mabes TNI secara terperinci. Setelah itu untuk dukungan bekal awal didistribusikan langsung oleh mabes TNI kepada satuan pengaman melalui Kormar dalam hal ini Dismat Kormar yang akan

mengelola pengambilan dan distribusi kepada satuan tugas. Untuk bekal ulang Babek TNI langsung mendistribusikan kepada Satuan tugas melalui Mabesal dalam hal ini dopus yang mengaksi pengambilan dan pendistribusian kepada satuan pemakai III (satkai III) yang selanjutnya di distribuksikan ke satuan tugas yang suda berada di daerah operasi. Mekanisme dukungan logistik bisa digambarkan seperti gambar yang ada di bawah ini:

Gambar Konsep distribusi Dukungan Logistik.





Dengan mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dukungan logistik pada satuan tugas yang berada di daerah penugasan. Sehingga distribusi dukungan logistik atau *supply chain sistem* dapat dilaksanakan dengan baik dan terpadu sehingga satuan tugas yang berada di daerah penugasan tidak lagi bergerak untuk mengambil bekal logistik yang akan digunakan di pulau – pulau tersebut

- b. Pemecahan Masalah.
- Berdasarkan uraian – uraian di atas, dirumuskan

kebijakan, strategi dan upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan dukungan logistik yang tepat dalam rangka mencapai kesiapan satuan tugas pengamanan pulau – pulau terluar dalam rangka mendukung tugas pokok Korps Marinir. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas

menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan pada dasarnya memuat arah dan tujuan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan sekumpulan strategi dan serangkaian upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kebijakan yang diambil dalam rangka membuat konsep dukungan logistik guna kesiapan satuan tugas pengamanan pulau terluar dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir adalah:

”Terwujudnya konsepsi dukungan logistik melalui peningkatan infrastruktur, keterpaduan komunikasi dan informasi serta pemberdayaan manajemen logistik guna kesiapan satuan tugas pengamanan pulau terluar

dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir.”

2) Strategi

Strategi adalah suatu langkah atau cara mendaya guna, dana, sarana dan prasarana kekuatan dalam mencapai sasaran dengan pengaturan skala prioritas pada setiap sasaran yang ingin dicapai. Dengan penerapan manajemen strategi dalam organisasi diharapkan akan membawa manfaat yaitu, membantu organisasi lebih efektif, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, mengurangi aktivitas yang tumpang tindih, memotivasi keterlibatan karyawan, identifikasi lingkungan yang berisiko. Berdasarkan kebijakan diatas maka perlu adanya penjabaran secara kongkrit dengan menyusun strategi yang digunakan untuk melaksanakan dukungan logistik guna kesiapan

satuan tugas pengamanan pulau terluar sebagai berikut.

a) Strategi – 1

Mewujudkan dukungan logistik dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi sarana penunjang distribusi logistik guna kesiapan satuan tugas pengamanan pulau terluar dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir.

b) Strategi - 2.

Mewujudkan keterpaduan komunikasi dan informasi dengan menggunakan teknologi terbaru guna mendukung kesiapan satuan tugas pengamanan pulau terluar dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir.

c) Strategi-3.

Mewujudkan pemberdayaan manajemen logistik dengan menggunakan logistik chain atau rantai logistik guna kesiapan satuan tugas pengamanan

pulau terluar dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir.

3) Upaya

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah disusun bagi pengembangan pengamanan wilayah dan pemberdayaan potensi pulau-pulau terluar perbatasan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a) Upaya yang dilaksanakan dalam mendukung Strategi-1.

(1) Mabes TNI membuat regulasi atau ketetapan terkait dengan mekanisme dukungan logistik tiap – tiap satgas pulau terluar.

(2) Mabasal melaksanakan koordinasi dengan Mabes TNI terkait dengan penunjukan atau penugasan

personel yang akan melaksanakan satgas pulau terluar.

(3) Kormar melaksanakan sosialisasi ketetapan atau mekanisme dukungan logistik satgas pulau terluar, selanjutnya melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan satgas pulau terluar.

b) Upaya yang dilakukan dalam mendukung Strategi-2 Dengan gelar satuan tugas pengamanan pulau terluar dimana Dankormar sebagai panglima Komando Operasi memudahkan untuk melaksanakan komunikasi dan memberikan informasi terkait kebutuhan yang di perlukan untuk mendukung kesiapan

satuan tugas pengamanan pulau terluar yaitu staf Logistik Kormar bisa berkomunikasi dan berkoordinasi terkait kebutuhan satuan tugas pengamanan pulau terluar, sehingga Upaya yang dilaksanakan dalam mendukung strategi 2 sebagai berikut.

(1) Mabes TNI menunjuk Dankormar melalui Direktorat Operasi sehingga dukungan Logistik sepenuhnya turun ke kormar sebagai komando operasi tidak melewati satuan samping lainnya.

(2) Mabesal melaksanakan koordinasi dengan mabes TNI terkait dukungan anggaran

operasi satgas
pulau terluar
(3) Kormar
melaksanakan
penyusunan
rencana
kebutuhan
anggaran satgas
pulau terluar
pada setiap
tahunnya
diajukan kepada
mabas TNI
dengan
tembusan
Mabesal.

c) Upaya yang
dilakukan dalam
mendukung Strategi-3
Dalam pelaksanaan
operasi pengamanan pulau
terluar sangat dibutuhkan
kecepatan dan ketepatan
dalam mendukung
pelaksanaan operasi
satgas pulau terluar
sehingga, upaya yang
dilaksanakan sebagai
berikut:

(1) Mabes
TNI dalam hal ini
babek TNI agar
pendistribusian
bekal satgas pulau

terluar agar
mendistribusikan
padasaat sebelum
pemberangkatan
penugasan
sebagai bekal
awal atau bekal
umum, bekal
selama
penugasan, bekal
ulang, sampai
dengan akhir
penugasan
didistribusikan
langsung kepada
satkai III yang
sudah ditunjuk
oleh Mabesal.
(2) Mabes
dalam hal ini
slogal agar
melaksanakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pendistribusian
bekal dari Mabes
TNI yang
diturunkan pada
satkai III yang
sudah di tunjuk
baik dilantamal
ataupun lanal di
wilayah operasi

satgas pulau
terluar.

(3) Kormar
dalam hal ini staf
logistik
melaksanakan
koordinasi dengan
slog Mabes TNI
terkait dukungan
bekal satgas dan
koordinasi dengan
Mabesal terkait
penunjukan satkai
III di wilayah
operasi untuk
membantu dan
mendukung
kelancaran
dukungan logistik
yang akan di
distribusikan ke
satuan tugas
pengamanan
pulau terluar.
Satkai III.

5. Penutup.

a. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan –
pembahasan di atas, maka
disimpulkan :

1). Infrastruktur yang ada saat ini
belum memadai terutama pada sarana
dan prasarana yang digunakan untuk

mendukung satuan tugas pengamanan
yang ada di pulau – pulau terluar
sehingga dibutuhkan pembangunan
sarana dan prasarana dalam
mendukung pelaksanaan operasi
satgas pulau terluar.

2) Belum terintegrasinya staf logistik
Mabes TNI, Mabesal dan Kormar
secara sistem yang menggunakan
teknologi guna memperlancar
informasi dan komunikasi dalam
mempersiapkan satuan tugas mulai
dari perencanaan, pengadaan,
penyimpanan, dan pendistribusian.
Sehingga banyaknya keterlambatan
distribusi yang terencana dan
terjadwal guna mendukung satuan
tugas di pulau terluar sehingga
personel satgal melaksanakan
pengambilan dukungan logistik ke
satkai III yang seharusnya hal ini tidak
terjadi dan bisa menimbulkan
kecelakaan dan kerugian baik personel
dan materil.

3) Pelaksanaan manajemen logistik
yang belum dapat dilaksanakan
dengan baik. Dalam proses supply
chain dikarenakan pemahaman
terhadap logistik di masing – masing
personel sangat kurang. Ego sektoral
yang masih menjadikan perdebatan
yang tidak akan berujung. Teori
logistik tidak bisa memenangkan
pertempuran tetapi Tanpa logistik

pertempuran tidak akan bisa dimenangkan, jadi logistik sangatlah vital dimana jika supply chain logistik tidak berjalan maka pertempuran, penugasan dan perintah tidak akan bisa dimenangkan dengan baik. Sehingga perlu adanya pemahaman bahwa logistik merupakan salah satu faktor penting untuk dapat memenangkan atau keberhasilan suatu penugasan.

b. Saran.

1) Mohon dapatnya, Mabes TNI agar dalam penataan ruang pertahanan di pulau – pulau terluar dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi satgas pulau terluar yang meliputi dermaga, messing, komunikasi, jarring internet, sarana patroli searider, serta penyusunan regulasi mekanisme dukungan logistik pengamanan pulau terluar

2) Mohon dapatnya Mabes TNI dilaksanakannya sosialisasi kepada seluruh staf logistik angkatan, kotama, dalam rangka mengintegrasikan jajaran staf logistik guna mendukung satuan tugas pulau terluar.

3) Mohon dapatnya Mabes TNI, Mabesal dan Kormar untuk mensosialisasikan dan mengedukasi satuan tugas tentang manajemen

logistik guna mendukung satuan tugas pulau terluar.

DAFTAR PUSTAKA.

Dan Barang Cetak

Donald j Bowersox, (2004), Manajemen Logistik (Integrasi sistem – sistem manajemen distribusi fisik dan manajemen material), jakartam PT. Bumi Aksara.

Setiajadi, (2015), Pengantar manajemen logistic 2015.

Yolanda M Siagian, aplikasi supply chain management dalam dunia bisnis, 2005.

Bowersox,D.J., (1996) logistical management: Intrgrated Supply.

Gitosudarmo, Indriyo. 2000. Manajemen Pemasaran. BPFE. Yogyakarta.

Alex S. W Retraubun, Sri Atimini, Profil pulau – pulau kecil terluar di Indonesia, DKP Dirjen Pesisir dan pulau – pulau kecil Direktorat pemberdayaan pulau pulau terkecil.

B. Publikasi elektrtronik

uns.ac.id, “Pengelolaan dan pengamanan pulau pulau terluar <https://sasmini.staf.ins.ac.id/2009/11/03, indonesia- ikatlah ilmu dengan menuliskannya”>, diakses pada 12 juli 2023.

kajianpustaka.com, “Tujuan, Fungsi dan Komponen Manajemen Logistik”,

<https://www.kajianpustaka.com/2019/03> diakses pada 12-07-2023.

gurupendidikan.co.id "Pertahanan Negara - Pengertian, Sistem, Strategi, Para Ahli", <https://www.gurupendidikan.co.id/pertahanan-negara/#sumarsono> diakses tanggal 12 – 07- 2023.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982

Undang – undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perbatasan Negara.

Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pulau Terluar.

Peraturan Presiden Nomor 66 TAHUN 2019 Tentang Susunan Organisasi Tugas Tentara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah Laut Sulawesi

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep

1150/Xii/2021 Tgl 10 Des 2021 Ttg Bujuknis Pengamanan Pulau Terluar Strategis di Wilayah NKRI.